

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Koesno, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Grup, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksanaan Republik Indonesia Posisi Dan Fungsinya Dalam Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gosita, Arif, 1998, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gunakarya, Widiada dan Petrus Irianto, 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan Bentuk Penerapan Sarana Non Penal dan Sarana Penal pada Pendidik dan Peserta Didik*, Alfabeta, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Krisnawati, Dani, Eddy O.S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, dan Supriyadi, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

- Marpaung, Leden, 2009, *Asas - Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.
- Prakoso, Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung.
- S., Siswanto, 2009, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ui Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sujono, A.R. dan Bony Daniel, 2013, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* Sinar Grafika, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Syamsudiin, Aziz, 2004, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Wiyono, R., 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Callanan, Valerie J., "The Influence of Media on Penal Attitudes, *Criminal Justice Review*", Sage, Desember 2011.

Eleanora, Fransiska Novita dan Nina Zainab, "Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 6, No. 1, Maret 2020.

Handoko, Dwi, "Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya," *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XII, No. 3, April 2018.

Harefa, Beniharmoni, "Diversi sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Februari 2015.

Hartanto, Cakra Nur Budi, "Fungsi Pra Penuntutan Terhadap Keberhasilan Penuntutan Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No.4, Desember 2017.

Jacob, Efryan R.T., "Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 1, Januari-Februari 2017.

Jainah, Zainab Ompu, "Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnational Organized Crime", *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, Juli 2013.

Kuspitasari, Inten, Purwoto, dan Umi Roziyah, "Peran Kejaksanaan Sebagai Eksekutor Pidana Mati Di Indonesia", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Limbong, Amelia Geiby, "Kajian Hukum Terhadap Sistem Pidana Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3, No. 4, Agustus-November 2014.

Listyawati dan R. Suprayogo, "Daerah Merah Penyalahgunaan Narkotika: Kajian Tentang Penyalahgunaan Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No. 1, April 2017.

Meyrina, Rr. Susana Andi, "Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17, No. 1, Maret 2017.

Mitendra, Hario Mahar, "Fenomena dalam Kekosongan Hukum", *Jurnal Rechtsvinding*, April 2018.

- Muttaqin, Imron dan Bagus Sulistyono, “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Broken Home”. *Jurnal Studi Gender dan Anak Raheema*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Piодо, Robert Andiono, “Penuntutan Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3, No. 4, Agustus-November 2014.
- Pratama, Kadek Danendra dan Komang Pradnyana Sudibya, “Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019.
- Purwanti, Ani dan Arief Syahrul Alam, “Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia”. *Jurnal Syariah dan Hukum de jure*, Vol. 7, No. 2, Desember 2015.
- Rahayu, Sri, “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.
- Saharuddin,. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No: 164/Pid.B/2009/Pn.Pl)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*., Vol. 2, No. 2, 2014.
- Wicaksono. Adi Hardiyanto dan Pujiyono, “Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, No. 1, 2015.
- Wood, Jane L dan G. Tendayi Viki, “Public Attitudes to Crime and Punishment: A Review of the Research”, *University Of Kent*, 2001.
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti, “Penanganan Perkara Anak Melalui *Restorative Justice*”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2014.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Mubarokah, Farchah, 2018, *Penegakan Hukum Pidana Oleh Polres Sleman Terhadap Pengguna Narkotika Yang Melakukan Kejahatan Menggunakan Narkotika Kembali Saat Proses Rehabilitasi*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Mulyono, Tri Adi, 2014, *Upaya Badan Narkotika Provinsi (BNP) Yogyakarta Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak (Studi Atas Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak)*, Skripsi,

Program Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Putri, Diana Agita, 2019, *Peran Kejaksaaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaaan Negeri Karanganyar)*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Sudiharto, 2015, *Kebijakan Kejaksaaan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

D. Internet

A., Andi Muhammad Rizal, “Kasus Tindak Pidana Narkotika, Dominasi Tindak Pidana Hukum di Kejaksaaan Bulungan”, <https://rri.co.id/1375-jaksa-menyoapa/635204/kasus-narkotika-dominasi-tindak-pidana-hukum-di-kejaksaaan-bulungan>, diakses 29 Juni 2021.

Aditya, Rifan, “Contoh-Contoh Pasal Karet UU ITE yang Perlu Diketahui”, <https://www.suara.com/news/2021/02/16/113435/contoh-pasal-karet-uu-ite-yang-perlu-diketahui?page=all>, diakses 29 Mei 2021.

Andrianih, Aan. “Anak Sebagai Subyek Hukum Khusus”, <https://www.gresnews.com/mobile/berita/opini/91081--anak-sebagai-subjek-khusus-dalam-hukum/#:~:text=Subyek%20hukum%20ialah%20pemegang%20hak%20dan%20kewajiban%20menurut%20hukum.&text=Anak%20Danak%20serta%20balita%20pun,sampai%20dengan%20ia%20meninggal%20dunia>, diakses 15 Februrari 2021..

Badan Narkotika Nasional Kota Bandung, “Sifat Jahat Narkoba”, <https://bandungkota.bnn.go.id/mengenal-dunia-narkoba/>, diakses 13 Maret 2021.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan”, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses 13 Maret 2021.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. “Data Tindak Pidana”, http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/547-data-tindak-pidana?id_skpd=39#48, diakses 21 Maret 2021.

Bekasikota.go.id, “Jaksa Menyapa\|. Video Conference Jaksa Agung dengan Kejaksaaan Negeri Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia”,

<https://www.bekasikota.go.id/detail/jaksa-menyapa-video-conference-jaksa-agung-dengan-kejaksanaan-negeri-kota-kabupaten-se-indonesia>, diakses 29 Juni 2021.

Bidari, Ashinta Sekar, “Ancaman Narkoba Bagi Generasi Penerus Bangsa”, <https://media.neliti.com/media/publications/170163-ID-ancaman-narkoba-bagi-generasi-penerus-ba.pdf>, diakses 18 Maret 2021.

Faturrohman, “Pandemi COVID-19, Picu Penyalahgunaan Narkoba”, <https://fin.co.id/2020/06/25/pandemi-covid-19-picu-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses 3 Juni 2021.

HukumOnline.Com, “Bentuk-bentuk Surat Dakwaan”. <https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan>, diakses 29 Mei 2021.

HukumOnline.Com, “Restorative justice lebih Adil Buat Anak Melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55f3bdc00317a/irestoratif-justice-i-lebih-adil-buatanak/>, diakses 21 April 2021.

HukumOnline.Com, “Siapa Sajakah Penegak Hukum di Indonesia?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt502201cc74649/lembaga-penegak-hukum/>, diakses 21 Mei 2021.

Jogjapolitan, “Pengguna Narkoba di DIY terbanyak ke-5 di Indonesia”, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/07/15/510/1044485/pengguna-narkoba-di-diy-terbanyak-kelima-di-indonesia>, diakses 21 April 2021.

Kejaksanaan Negeri Bone, “Problematika Penerapan Prinsip Dominus Litis Dalam Perspektif Kejaksanaan”. <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/3/problematika-penerapan-prinsip-dominus-litis-dalam-perspektif-kejaksanaan.html>, diakses 3 Juni 2021.

Kejaksanaan Negeri Jakarta Barat, “JMS, Apakah Itu?”. <https://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/jms/pengertian#:~:text=Jaksa%20Masuk%20Sekolah%20atau%20disingkat,mencanangkan%20program%20Jaksa%20Masuk%20Sekolah.>, diakses 23 Mei 2021.

Kejaksanaan Republik Indonesia, “Pengertian Kejaksanaan”, https://www.kejaksanaan.go.id/profil_kejaksanaan.php?id=1, diakses 14 Maret 2021.

Kejaksanaan Tinggi Bali, “Plt. Kepala Kejaksanaan Tinggi Bali, Utama Wisnu, SH., MH menghadiri Puncak Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional

(HANI) Tahun 2021”, <https://www.kejati-bali.go.id/berita/detail/522>, diakses 14 Juli 2021.

Koran Sindo, “Penyalahgunaan Narkoba di Sleman Paling Tinggi”, <https://daerah.sindonews.com/berita/1357367/22/penyalahgunaan-narkoba-di-sleman-paling-tinggi>, diakses 28 Maret 2021.

LBH Nuraini, “Pasal 112: Pasal Karet pada UU Narkotika”, <https://nurani.or.id/pasal-112-pasal-karet-pada-uu-narkotika/>, diakses 29 Mei 2021.

Okezone.com, “Sleman Sumbang Angka Narkoba Terbesar di DIY, BNN: Banyak Kos dan Tempat Hiburan”, <https://yogya.inews.id/berita/sleman-sumbang-angka-narkoba-terbesar-di-diy-bnn-banyak-kos-dan-tempat-hiburan>, diakses 26 Maret 2021.

Pengertian Menurut Para Ahli, “Pengertian Eksploitasi Anak Menurut Para Ahli”. <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli/>, diakses 8 Juli 2021.

Priatmojo, Galih, “Kasus Narkoba Meningkatkan Tajam, 17 Pemakainya Berstatus Anak SD”, diakses melalui <https://jogja.suara.com/read/2019/12/26/210049/kasus-narkoba-di-sleman-meningkat-tajam-17-pemakainya-berstatus-anak-sd?page=all>, diakses 18 Maret 2021.

Putra, Bahrudin Agung Permana, Paham Triyoso dan Faizin Sulistio, “Peranan Kejaksaaan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat”, <https://media.neliti.com/media/publications/35341-ID-peranan-kejaksaaan-dalam-melakukan-pengawasan-terhadap-narapidana-yang-memperoleh.pdf>, diakses 16 Juli 2021.

Satryawan, Dennis, “1,6 Juta Anak Indonesia Menjadi Pengedar Narkoba”, <https://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba>, diakses 10 Maret 2021.

Setiawan, I Wayan Kartika, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)”, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/6807/5141#:~:text=Perlindungan%20hukum%20terhadap%20anak%20sebagai,sangatlah%20berbeda%20dengan%20orang%20dewasa.>, diakses 30 Maret 2021.

Sugiarsi, Sri “Instrumen Penelitian Kualitatif”,
<https://publikasi.apfirmik.or.id/index.php/Instrumen/article/view/71/73>,
diakses 2 Mei 2021.

Sulaiman, Reza dan Risna Halidi, “Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia”,
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia&ved=2ahUKEwji8bPs2pDwAhVXIbcAHeNFD-MQFjACegQIGRAC&usg=AOvVaw2OOnQ-1xDDq46Mir1Kd2nl&pcf=1>, diakses 22 April 2021.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

United Nations Standard Minimum Rules for The Administrarion Of Juvenile Justice 1985 (The Beijing Rules).

United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) 1990.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91).

F. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 56/Pid.Sus/2014/PN.Pdl. perihal Tindak Pidana Narkotika Atas Nama Terdakwa Ane Noviasari Binti Sarifudin, 29 April 2014.